

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANY JAYA
PROVINSI PAPUA TAHUN 2017
(Studi Di Desa Gumagame Kecamatan Yiginua Kabupaten Lany Jaya)**

Oleh : Yepius Yigibalom¹

ABSTRAK

Salah satu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan politik adalah berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Partisipasi politik masyarakat dalam sebuah kompetisi politik seperti pemilihan umum dipengaruhi oleh banyak factor, diantaranya peran pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan yang digunakan, penyelenggara pemilihan umum, partai politik, kepemimpinan, disamping factor budaya dan system social yang ada dan berkembang di tengah masyarakat.

Masyarakat desa Gumagame yang dalam kehidupan sehari-harinya hanya bertani dan kehidupan social yang terbelakang miskin, kepercayaan terhadap proses politik (pilkada) yang dapat membantu menyelesaikan masalah mereka ternyata telah menjadikan mereka cenderung apatis terhadap politik. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat politik masyarakat di desa Gumagame pada pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2017 tersebut. Dari data yang ada masyarakat yang menggunakan hak pilih hanya sekitar 200 orang dari 300 daftar pemilih tetap dalam pilkada. Hal itu dapat diasumsikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada tersebut sangat rendah. Kenapa hal itu terjadi tentu menarik untuk ditelusuri. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut agar kedepannya dapat dicarikan solusi untuk mengatasi persoalan terkait partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilu

**PUBLIC POLITICAL PARTICIPATION IN THE ELECTION OF
REGENT AND DEPUTY REGENT OF LANY JAYA DISTRICT, PAPUA
PROVINCE, 2017
(Study in Gumagame Village, Yiginua District, Lany Jaya Regency)**

By: Yepius Yigibalom

ABSTRACT

One of the people's participation in political activities is participating in the holding of general elections. Public political participation in a political

¹ Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Program Studi Ilmu Politik.

competition such as a general election is influenced by many factors, including the role of the government in the form of laws and regulations used, general election organizers, political parties, leadership, in addition to cultural factors and social systems that exist and develop in society.

The people of Gumagame village, who in their daily lives only farm and in a relatively poor social life, believe in the political process (pilkada) that can help solve their problems, which has made them tend to be apathetic towards politics. This is evidenced by the level of participation of the political community in the village of Gumagame in the election of the regent and deputy regent in 2017. From the existing data, only about 200 people from 300 final voter lists in the regional elections use their right to vote. It can be assumed that the level of public participation in the pilkada is very low. Why this happens is certainly interesting to explore. This research was conducted to fulfill this desire so that in the future solutions can be found to overcome problems related to public political participation in general elections.

Keywords: Political Participation, Election

PENDAHULUAN

Hingga kini system demokrasi masih dipercaya sebagai sebuah system yang paling baik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Untuk itu hingga kini Indonesia masih menerapkan system demokrasi dalam system pemerintahannya. Penerapan system demokrasi dalam sebuah negara itu sebenarnya terdiri dari beberapa indikator. Salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu untuk mengukur keberhasilan penerapan system demokrasi yang diterapkan oleh sebuah negara dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat. Dan salah satu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan politik adalah berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Partisipasi politik masyarakat dalam sebuah kompetisi politik seperti pemilihan umum dipengaruhi oleh banyak factor, diantaranya peran pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan yang digunakan, penyelenggara pemilihan umum, partai politik, kepemimpinan, disamping factor budaya dan system social yang ada dan berkembang di tengah masyarakat.

Hal ini sebagaimana yang terjadi kabupaten Lany Jaya Desa Gumagame Kecamatan Jiginua pada pilkada tahun 2017 yang lalu. Masyarakat desa Gumagame yang dalam kehidupan sehari-harinya hanya bertani dan kehidupan social yang terbelakang miskin, kepercayaan terhadap proses politik (pilkada) yang dapat membantu menyelesaikan masalah mereka ternyata telah menjadikan mereka cenderung apatis terhadap politik. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat politik masyarakat didesa Gumagame pada pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2017 tersebut. Dari data yang ada masyarakat yang menggunakan hak pilih hanya sekitar 200 orang dari 300 daftar pemilih tetap dalam pilkada. Hal itu dapat diasumsikan bahwa tingkat partisipasi

masyarakat dalam pilkada tersebut sangat rendah. Kenapa hal itu terjadi tentu menarik untuk ditelusuri.

Apatisme masyarakat juga mungkin disebabkan dari budaya pragmatis yang ada dan berkembang ditengah masyarakat. Hal itu ditemui penulis saat mencari data awal terkait rendahnya partisipasi politik masyarakat tersebut. Pragmatisme dimaksud dengan ditemukannya adanya praktik money politic pada saat pemilihan umum berlangsung. Fenomena yang demikian, tentu akan berdampak atau berpengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi masyarakat desa Gumagame dalam pilkada kabupaten Lany Jaya.

Dengan melihat data awal yang ada, membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh fenomena rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum di Desa Gumagame serta factor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat desa Gumagame dalam pilkada Lanny Jaya saat itu.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi Politik

1. Definisi Partisipasi Politik

Miriam Budiardjo (2008:367) menyatakan definisi umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan social dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Menurut Herbert McCloski (dalam Yoyoh Rohaniah dan Efriza 2015:470), partisipasi politik masyarakat adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Sementara Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political in Developing Countries*, memberi tafrisan yang lebih luas dengan memasukan secara eksplisit tindakan illegal dan kekerasan (dalam Miriam Budiardjo, 2008: 368). mereka menyatakan partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi pribadi yang dimasuk untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah partisipasi biasa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

“...By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making, participation may be individual or collective organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent legal or illegal effective or ineffective”.

Dalam Negara demokrasi yang mendasari partisipasi politik adalah kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan serta masa depan suatu Negara itu dan untuk menentukan orang - orang yang akan memegang skepemimpinan.

Berdasarkan penjelasan para ahli tentang definisi - definisi partisipasi politik dapat di simpulkan bahwa partisipasi politik adalah bentuk keterlibatan masyarakat baik individu atau kelompok dalam ruang lingkup kegiatan-kegiatan politik.

B. Sifat-Sifat Partisipasi Politik

Menurut Huntington dan Nelson sebagaimana dikutip Budiardjo (2008:370) partisipasi politik dapat bersifat Otonomi dan Mobilisasi.

1. Partisipasi politik yang bersifat Otonom (*Autonomous Participation*) yaitu partisipasi politik yang didasarkan pada kesadaran politik setiap warga untuk menentukan pilihan.
2. Partisipasi politik yang bersifat Mobilisasi (*Mobilized Participation*) yaitu partisipasi politik yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain.

Jadi partisipasi politik otonom dilaksanakan berdasarkan pada kesadaran politik setiap orang tanpa adanya paksaan, ancaman ataupun pengerahan. Partisipasi politik otonom murni muncul atas dorongan atau kehendak pribadi. Sedangkan partisipasi politik yang dimobilisasi merupakan partisipasi politik yang dilakukan oleh karena dikerahkan. Biasanya partisipasi yang di mobilisasi tidak berdasarkan pada kesadaran pribadi, tetapi terjadi melalui paksaan, ancaman bahkan tindakan kekerasan lainnya dengan maksud mengubah pilihan warga.

C. Bentuk Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Dusseldorp (dalam Miriam Budiardjo, 2008: 370), salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk - bentuk keterlibatan seseorang sebagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penilaian. Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalan *public policy*. Sehingga kualitas dari hierarki partisipasi politik masyarakat dilihat dalam keaktifan atau kefasipan (apatis) dari bentuk partisipasi politik masyarakat.

Gabriel A. Almond membedakan partisipasi politik masyarakat dalam dua bentuk yaitu:

1. Partisipasi politik konvensional, sebuah bentuk partisipasi politik masyarakat yang 'normal' dalam demokrasi modern.
2. Partisipasi politik non Konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik masyarakat yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Sementara itu Maribath dan Goel (Rahman 2007: 289) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori:

- a. Apatitis adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator adalah orang yang sedikit- tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- c. Gladiator adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktivis partai dan aktivis masyarakat.
- d. Pengkritik adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Dalam buku Pengantar Sosiologi Politik (Maran, 2001:148), Minchel Rush dan Philip Althoff mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi
- b. Mencari jabatan politik atau administrasi
- c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik
- d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
- e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik
- f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb
- h. Partisipasi dalam diskusi politik internal
- i. Partisipasi dalam pemungutan suara

Menurut Mas'ood dan Mac Andrews (2000:225) adalah peran serta atau partisipasi politik masyarakat secara umum dapat kita kategorikan dalam bentuk-bentuk berikut:

- a. *Electoral Activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan perhitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya.
- b. *Lobbying*, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.
- c. *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa.
- d. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya, dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukannya.

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Menurut Ramlan Surbakti (2006:144) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi yang otonom adalah :

- a. Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan dan politik tempat ia hidup. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik.
- b. Kepercayaan terhadap pemerintah yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya atau tidak. Apabila pemerintah sebelumnya dianggap tidak dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, maka pada pemilihan politik selanjutnya akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu adapun tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu:
 - a. Tahapan Persiapan
 - b. Tahapan Pelaksanaan
 - c. Tahapan Penyelesaian

Menurut Myron Weiner paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik ini.

Modernisasi, komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkatkan, penyebaran kependaian baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media komunikasi massa. Ketika penduduk kota baru yaitu buruh, pedagang dan kaum profesional.

Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Begitu terbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah dan meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.

Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern kaum intelektual sarjana, filosof, pengarang dan wartawan sering mengemukakan idea-idea seperiegalistersisme dan nasionalisme kepada masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Sistem-sistem transportasi dan komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran idea-idea baru. Kaum intelektual telah sejak lama menjadi pembuat dan penyebar idea-idea yang mampu merubah sikap-sikap dan tingkah laku dari kelas sosial lain melalui kaum intelektual dan media komunikasi modern, idea demokratisasi partisipasi telah tersebar ke bangsa-bangsa baru merdeka jauh sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.

Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik. Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasanya digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan idea-idea partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar "hak-hak" ini

dipenuhi. Jadi kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan kaum aristokrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.

Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintah menjadi semakin menyusup ke segala segi kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat merugikan kepentingannya. Maka dari itu, meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisirakan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Menurut Milbrath, sebagaimana di kutip Maran (2001:156-157) menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik:

1. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui mass media atau melalui diskusi informal.
2. Karena faktor karakteristik pribadi seseorang, orang yang berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik ekonomi dan lain-lainnya biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.
3. Faktor karakteristik sosial seseorang, karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan Agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lainnya tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Dan untuk itulah mereka mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.
4. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering di isi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

Menurut Mochtar Mas'ood & Colin Mac Andrews, (1978: 46-47) Menyebutkan dikebanyakan negara, *pendidikan tinggi* sangat mempengaruhi partisipasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa bisa

mengembangkan kecakapan menganalisa, dan menciptakan minat dan kemampuan berpolitik juga di banyak negara lembaga pendidikan dan kurikulumnya sengaja mempengaruhi proses sosialisasi politik kaum muda. Hal itu terjadi di semua negara, baik yang komunis, otoriter, maupun demokratis.

Disamping pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan status sosial ekonomi juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik misalnya laki-laki lebih aktif dari pada wanita; orang yang berstatus sosial lebih tinggi lebih aktif dari pada yang berstatus lebih rendah.

Juga banyak bukti yang mengungkapkan bahwa *partai politik* berpengaruh besar dalam partisipasi politik rakyat. Di Amerika Serikat, orang yang berpartai lebih besar sering memberikan suara dari pada yang tidak berpartai; orang yang setia kepada partainya lebih aktif lagi. Orang-orang yang berstatus rendah di negeri itu belum banyak di bantu oleh organisasi politik. Partai-partai buruh di Eropa telah bekerja keras untuk menarik golongan masyarakat berstatus rendah, sehingga golongan ini mempunyai dukungan organisasi bagi tuntutan-tuntutannya dan terdorong untuk berpartisipasi politik. Di Inggris buruh tidak terpelajar sering jauh lebih aktif dari rekan-rekan mereka di Amerika Serikat, ini terutama karena perjuangan gigih serikat buruh dan partai buruh untuk menggerakkan mereka.

Apakah aktivitas kampanye mempunyai pengaruh besar terhadap keputusan kaum pemilih (electorate) untuk berpartisipasi politik tidaklah begitu jelas. Biasanya kampanye-kampanye politik hanya dapat mencapai pengikut setia partai, dengan memperkuat komitmen mereka untuk memberikan suara. Tetapi meningkat jumlah pemberi suara secara dramatis di negara-negara bagian selatan Amerika akhir-akhir ini betul-betul akibat dari adanya registrasi yang rapi dan aktivitas pemberian suara di kalangan golongan rakyat berpenghasilan rendah yang secara tradisional apatis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang juga sangat mempengaruhi partisipasi politik adalah :

1. Tingkat pendidikan
2. Jenis kelamin
3. Status sosial ekonomi seseorang
4. Peran partai politik
5. Aktivitas kampanye
6. Calon-calon/tokoh politik yang memiliki daya tarik pribadi kuat (kharismatis).

E. Konsep Pemilih

Menurut Surbakti (2008 : 275) pemilih di Indonesia di bagi menjadi tiga kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar- benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilihan yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia memilih .

Menurut Undang-Undang pilkada Nomor 8 tahun 2015 disebutkan pada pasal 1 ayat (6) yaitu, Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pemilihan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemilih yang memiliki hak pilih pemilihan bupati adalah warga Negara yang telah memiliki hak suara dan tercantun dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum dengan rentang usia 17-21 tahun. Kelompok ini biasanya mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa serta pekerja muda. Dalam pemilihan mereka ini merupakan sangat pemilih yang sangat potensial dalam perolehan suara dan biasanya mereka memiliki karakteristik yang masih labil dan apatis. Hal itu disebabkan karena pengetahuan politiknya masih kurang dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum.

F. Konsep pemilihan Umum Kepala Daerah

Pada dasarnya Pemilihan umum kepala daerah langsung adalah merupakan sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat (civil education). Pemilihan langsung diharapkan dapat menjadi praktik berdemokrasi bagi rakyat, untuk membentuk kesadaran segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih dan pemimpin yang benar sesuai hati nurani.

Pemilihan kepala daerah di lakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Yang termasuk pemilihan kepala daerah adalah:

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
3. Walikota dan wakil walikota untuk kota

Pemilihan di selenggarakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dengan diawasi oleh pengawas pemilihan umum provinsi dan Panwaslu kabupaten kota. Dalam buku Politik Hukum Pemilu Afan Gafar (2012:85) mengatakan bahwa salah satu wujud demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Pemilihan merupakan sasaran manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah.

Pemilihan umum kepala daerah sebagai mana pemilihan umum nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintah secara damai dan teratur melalui pemilihan kepala daerah. Rakyat secara langsung akan memilih pemimpin di daerahnya. Pemilihan Kepala daerah dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah/legitimasi (Mustafa Lutfi,2010:130).

Menurut Peraturan KPU No 2 tahun 2017 (didalam BAB I ketentuan umum), di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota selanjutnya, disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah dan provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau/walikota dan wakil walikota secara langsung demokratis. Selain itu pemilihan langsung dapat di sebut sebagai praktik politik demokrasi apa bila memenuhi beberapa prinsip, yakni menggunakan asas-asas

yang berlaku dalam rekrutmen terbuka sama hanya seperti pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden yakni asas luber dan jurdil.

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya dan tanpa perantara.

2. Umum

Pada dasarnya semua warga yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pemilihan yang bersifat umum mempunyai makna yang menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku agama, ras golongan, jenis kelamin kedaerahan, pekerjaan, dan staus social.

3. Bebas

Setiap warga Negara berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan diri siapapun dalam melaksanakan haknya setiap warga Negara dijamin kejaminannya sehingga dapat memilih sesuai hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia

Dalam memberikan suara, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak maupun dengan jalan apa pun pemilih memberikan suaranya pada surat suara dan tidak dapat di ketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya di berikan.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan setiap penyelenggara pemilihan aparatur pemerintah, calon/peserta pemilihan pengawas pemilihan pemantauan pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perundang undang.

6. Adil

Dalam penyelengaran pemelihan setiap pemilih atau calon/peserta pemilihan mendapatkan perilaku yang sama serta bebas dari kecenderungan pihak maupun.

Setelah melihat penjesalan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan adalah suatu kegiatan untuk melakukan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil rakyat atau pemimpin dengan pemilihan langsung yang menggunakan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat desa Gumagame Kecamatan Jiginua dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten Lany Jaya tahun 2017. Dalam pengumpulan data Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan penelitian yang di rumuskan dalam beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh informan sesuai dengan variable yang akan diteliti. Metode dalam pengumpulan data baik itu data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara wawancara dan pengumpulan berbagai dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi untuk menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Desa Gumagame, kecamatan Jiginua kabupaten Lanny Jaya pada tahun 2017, selanjutnya analisis untuk membedakan factor pendukung dan factor kendala maka ditemukan kelemahan dalam partisipasi politik masyarakat.

PEMBAHASAN

Pemilihan umum Bupati Lanny Jaya tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. Pemiulu ini untuk menentukan Bupati dan wakil Bupati Lanny Jaya periode 2017 – 2022. Pada pemilihan ini diikuti oleh dua pasangan kandidat yaitu Briyur Wenda, S.Pd., MAP dan Paulus Koyoga S.Sos beserta Befa Yigibalom, SE, M.Si dan Yemis Koyoga, S.IP. Pada pemilihan tersebut pasangan Befa Yigibalom dan Yemis Kogoya mengalahkan pasangan Briyur Wenda dan Paulus Kogoya.

Pada Pemilihan saat itu pasangan Befa Yigibalom dan Yemis Kogoya diusung oleh beberapa gabungan partai , yaitu : Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Pasrtai Nasional Demokrat, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Sedangkan pasangan Briytur Wenda dan Paulus Kogoya diusung oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Golongan Karya.

1. Faktor Yang Menghambat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lanny Jaya.

Pada negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu elemen yang penting. Partisipasi politik masyarakat bahkan dipercaya sebagai pondasi dalam praktek demokrasi perwakilan. Karena dalam demokrasi perwakilan pemilu merupakan ajang kontestasi dalam memilih wakil rakyat yang sepatutnya dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis.

Pemilu merupakan sebuah alat untuk mengisi posisi dan jabatan publik melalui proses pemilihan oleh masyarakat pemilih yang bertujuan untuk memberikan legitimasi pada sebuah regime dalam politik modern yang diarahkan untuk mendukung berjalannya pemerintahan presidensiil dan pemerintahan daerah yang efektif. Oleh sebab itu terkait dengan ini peran masyarakat dalam pemilu menjadi penting. Seperti yang dikatakan oleh Mirriam Budiardjo (1982) bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau

sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Ironisnya hingga saat ini masih banyaknya permasalahan yang terkait dengan partisipasi politik masyarakat terkait dengan pemilu termasuk dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Berikut ini akan dipaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lanny Jaya yang menjadi lokasi penelitian khususnya di Desa Gumagame kecamatan Yiginua. Dari data yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat ketika pemilihan itu berlangsung, diantaranya :

a. Peran Pemerintah

Pemerintah mempunyai andil yang cukup besar terkait dengan suksesnya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lanny Jaya, khususnya yang ada korelasinya dengan partisipasi politik masyarakat. Karena prinsip dasarnya pelaksanaan pemilu itu tujuan akhirnya diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.

Peran pemerintah yang cukup mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lanny Jaya diantaranya adalah terkait dengan sistem perundangan (peraturan) yang dibuat terkait dengan sistem pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lanny Jaya. Setidaknya masih ada (jika tidak bisa dikatakan masih banyak) peraturan perundangan yang dibuat terkait dengan sistem kepemiluan masih menghambat pertumbuhan partisipasi politik masyarakat. Misalnya siapa saja yang berhak mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lanny Jaya sebagai pemilih. Bahkan ada kesan yang tumbuh dimasyarakat justru peraturan yang ada sangat kontradiksi dengan slogan yang selalu dikumandangkan oleh pemerintah yang terkait dengan partisipasi masyarakat. Dimana satu sisi masyarakat selalu dihimbau untuk berpartisipasi akan tetapi justru aturan yang dibuat justru menghambat masyarakat dalam berpartisipasi. Dilapangan sangat sering ditemukan masyarakat terbentur aturan administrasi ketika akan berpartisipasi yang justru penyebabnya merupakan kesalahan yang dilakukan pihak pemerintah sendiri.

Sistem perundangan yang terkait dengan pemilu juga saat ini dimana terdapat beberapa komplikasi pengaturan terkait dengan peraturan kepemiluan. Seperti yang diketahui bahwa pada tataran hukum, terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pemilu, yaitu :

1. Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

4. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang signifikan kaitannya dengan tingkat partisipasi politik masyarakat diantaranya adalah siapa saja yang dikategorikan sebagai pemilih. Ketentuan bahwa yang menjadi pemilih adalah masyarakat yang memiliki KTP bahkan saat ini ditambah KTP Elektronik atau dengan atau memiliki NIP saja, jelas sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan sebagai akibat kelalaian pelayanan publik pihak pemerintah.

Di Desa Gumagame kecamatan Jiginua kabupaten Lany Jaya provinsi Papua permasalahan ini juga diakui oleh penyelenggara baik KPU maupun Panwasda kabupaten Lanny Jaya. Dalam menjalankan tugas seringkali mereka terbentur dengan permasalahan peraturan perundangan yang berlaku namun banyak ketidakjelasan.

b. Peran Penyelenggara Pemilu

Adanya kelemahan sistem peraturan perundangan kepeiluan jelas akan berdampak bagi peran para penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun dari sisi pengawasannya yang dalam hal merupakan tugas dari PANWAS. Tidak jarang KPU dan PANWAS di daerah kehilangan kepercayaan diri dalam menjalankan fungsinya sebagai akibat lemahnya aturan yang dibuat.

Masalah lain yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu terkait dengan peran penyelenggara pemilu adalah kurangnya atau lemahnya sosialisasi yang dilakukan. Hal itu kebanyakan disebabkan oleh minimnya dana yang dimiliki. Selain itu ada juga permasalahan terkait dengan independensi para penyelenggara. Independensi penyelenggara sangat sulit diciptakan sebagai salah satu akibat dari peraturan yang ada. Seperti yang diketahui sesuai peraturan perundangan yang berlaku pihak penyelenggara masih sering diganggu dengan pencairan anggaran yang padahal sangat berpengaruh pada pelaksanaan tahapan. Maka tidaklah mengherankan sering terjadi *bargaining* antara penyelenggara dengan pihak Pemda sebagai pemiliki otoritas pendanaan. Dan hal ini sangat rawan terjadinya kongkalikong antara mereka, dan independensi di pertaruhkan.

Sementara dari pihak PANWAS lemahnya SDM, infrastruktur yang dimiliki ditambah dengan lemahnya aturan yang dibuat terkait fungsi dan kewenangan mereka membuat PANWAS sangat sulit menjalankan fungsinya secara optimal. Aturan yang ada saat ini hanya memberikan kewenangan bagi panwas hanya sebagai pemberi rekomendasi tanpa hak eksekusi penindakan menjadi problem serius.

Di Desa Gumagame kecamatan Jiginua kabupaten Lany Jaya provinsi Papua permasalahan ini juga diakui oleh penyelenggara baik KPUD maupun Panwasda kabupaten Lanny Jaya. Dalam menjalankan tugas seringkali mereka terbentur dengan permasalahan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Peran Partai Politik

Partai politik dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi merupakan syarat mutlak. Keberadaan partai politik dalam negara demokrasi merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya demokrasi. Yang jadi masalah saat ini keberadaan partai politik di Indonesia menjadi faktor penyebab rapuhnya sistem demokrasi yang kita anut. Hal itu disebabkan karena partai politik yang ada saat ini belum dapat menjalankan fungsi dengan baik.

Sebagai bukti problematika demokrasi terkait partai politik adalah salah satu fungsi partai politik yang erat kaitannya dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yaitu fungsi pendidikan politik. Fakta menunjukkan partai politik sangat lemah dalam menjalankan fungsi ini. Bahkan yang terjadi saat ini, tingkah laku partai politik justru telah mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi kedalam jurang apatisme yang dalam.

Selain itu misalnya fungsi rekrutmen. Fungsi ini menjadi momok bagi masyarakat jika melihat bagaimana partai politik menjalankan fungsi rekrutmen ini. Hal ini tidak saja menjadi permasalahan bagi masyarakat yang melihat akan tetapi juga menjadi masalah intern partai politik itu sendiri. Terjadinya kecemburuan antar sesama anggota dalam sebuah partai politik menjadi sebuah pemandangan yang lumrah. Hal itu disebabkan karena terkadang bahkan bisa dikatakan sering, demi pertimbangan pendanaan partai, fungsi rekrutmen ini sering dikorbankan. Banyak fakta yang menunjukkan dalam sebuah pencalonan partai politik akan mengusung figur yang memiliki dana walaupun figur itu tidak pernah atau belum pernah menjadi anggota dari partai politik itu. Sementara banyak kader yang sudah lama menjadi anggota dan memiliki kapabilitas yang lebih baik namun tidak memiliki dana akhirnya tidak dicalonkan.

Untuk itu pembenahan partai politik saat ini sudah menjadi syarat mutlak jika kita menginginkan sistem demokrasi kita bisa menjadi baik. Karena menurut undang-undang 1945 yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik. Walaupun sebagai dampak dari eforia reformasi dan akibat kekecewaan terhadap keberadaam partai politik yang berkembang di tengah masyarakat, telah memunculkan kemungkinan peserta pemilu perseorangan (non partai).

Bahkan saat ini ada wacana yang mengemuka tentang rencana pengaturan mekanisme dan persyaratan pencalonan yang wajib diikuti oleh partai politik dalam sebuah pemilu. Walau terasa sulit namun hal itu perlu dicoba.

Di Desa Gumagame kecamatan Jiginua kabupaten Lany Jaya provinsi Papua permasalahan ini juga diakui oleh beberapa informan yang sempat di wawancara pada saat penelitian. Partai politik yang ada di wilayah ini dinilai masih belum menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan.

2. Faktor Yang Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lanny Jaya.

a. Besarnya Keinginan Untuk Berpartisipasi

Pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 di Desa Gumagame kecamatan Jiginua kabupaten Lany Jaya provinsi Papua menunjukkan angka partisipasi masyarakat yang dilihat dari pemilih yang ikut memilih dapat dikatakan cukup tinggi yaitu hingga mencapai 89 persen. Adapun faktor yang mendukung fenomena politik ini diakibatkan dari terbentuknya kesadaran dan antusiasme masyarakat yang mandiri untuk menggunakan hak politiknya, dengan pertimbangan bahwa calon yang hadir dalam pentas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Desa Gumagame kecamatan Jiginua kabupaten Lany Jaya provinsi Papua cukup memiliki kapasitas dalam mewujudkan harapan mereka. Melihat kandidat yang saat itu ikut bertarung didalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah figur-figur yang dianggap memiliki kapasitas adalah sebuah alasan yang sebenarnya rasional dan kritis. Hal ini dapat dikatakan demikian apabila ditinjau dari alasan masyarakat kenapa menganggap calon yang hadir cukup memenuhi kapasitas dalam memenuhi keinginan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh sebagian besar warga yang diwawancara terkait dengan alasan mereka ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Desa Gumagame kecamatan Jiginua kabupaten Lany Jaya provinsi Papua yang mengatakan bahwa :

“calon yang bertarung kali ini cukup dekat dengan masyarakat, mereka selalu turun ke lapangan, rajin berkunjung, dan berdialog langsung dengan masyarakat. Karena wilayah Kabupaten tidak begitu luas, kadang-kadang dalam sehari ada beberapa calon yang datang. Kedatangannya pun sering membawa sesuatu bagi masyarakat. Ini membuat masyarakat selalu menunggununggu kehadiran para calon dan tentunya hari pelaksanaan pemilihan.”

Fakta ini berbeda dengan fenomena pada beberapa daerah lain di Indonesia. Akibat perilaku para kandidat telah menimbulkan rasa apriori yang berakibat pada apatisisme masyarakat dalam berpartisipasi. Tapi dalam perjalannya bila kita telisik lebih jauh lagi kebanyakan alasan masyarakat tidak menggunakan hak suaranya dikarenakan adanya kepentingan individual lainnya, baik hari libur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dijadikan momentum untuk liburan atau tidak memiliki waktu karena kesibukan akan urusan pribadi. Di-sisi lain kita juga akan melihat bahwa mereka yang tidak menggunakan hak suaranya lebih kepada karena calon yang hadir tidak memiliki kedekatan secara suku sebuah ciri politik primordialisme yang masih saja ada di tengah pentas politik di Indonesia.

b. Peran Media Massa

Peran media dalam demokrasi sangat penting. Media diharapkan dapat menjalankan fungsi tidak hanya sebagai sumber informasi namun juga diharapkan dapat menjadi sarana dalam pendidikan politik. Isi media dalam memberikan informasi secara luas mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

juga mendorong terciptanya kesadaran orang untuk menentukan pilihannya. Sebaliknya jika media rendah intensitasnya dalam memberitakan peristiwa politik, khususnya informasi tentang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mendorong rendahnya keterlibatan masyarakat didalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Desa Gumagame kecamatan Jiginua kabupaten Lanny Jaya provinsi Papua berlangsung, media telah dapat dikatakan cukup berhasil dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat dibuktikan dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi sebagai akibat dari agitasi media terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pemberitaan yang dilakukan secara terus menerus bahkan penyediaan kolom dan rubric khusus untuk sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lanny Jaya maupun sarana kampanye bagi para kandidat saat itu merupakan salah satu indikator peran media dalam mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Desa Gumagame kecamatan Jiginua kabupaten Lanny Jaya provinsi Papua. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang komisioner KPU Kabupaten Lanny Jaya, beliau menuturkan :

“....di Kabupaten Lanny Jaya masyarakat sangat rajin mengikuti perkembangan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui media massa. Hal ini menjadi salah satu keuntungan bisnis bagi media, sehingga pemberitaan dilakukan secara terus menerus. Ini telah menjadi salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dengan pasti tentang proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lanny Jaya.”

c. Kinerja KPUD

Salah satu factor yang juga menjadi pendorong tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lanny Jaya pada tahun 2017 lalu yakni peran dari penyelenggara yaitu KPUD kabupaten Lanny Jaya. Penataan daftar pemilih tetap (DPT) yang baik sangat mendukung tingginya partisipasi politik. Sementara persoalan ini sering menjadi masalah selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati karena banyaknya warga yang sering tidak terdaftar sehingga menjadi sebuah permasalahan krusial yang tidak mendapatkan solusi. Factor pendorong lain akibat peran dari KPUD adalah kesuksesan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

d. Peran Kandidat Bupati Dan Wakil Bupati Yang Berkompetisi

Factor yang juga sangat berpengaruh pada tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Lanny Jaya adalah strategi yang dijalankan oleh sebagian besar dari para kandidat yang bersaing kala itu. Strategi money politik telah berhasil mendongkrak tingkat partisipasi politik saat itu. Hal itu mendapat dukungan dari tingkat pragmatisme politik masyarakat kabupaten Lanny Jaya yang dikenal sangat tinggi.

e. Faktor Sosial Budaya

Faktor yang juga sangat berpengaruh pada partisipasi politik adalah faktor sosial dan budaya yang berkembang dan dianut oleh masyarakat. Pragmatisme merupakan sebuah budaya yang cukup subur tumbuh di negara ini. Ini berdasarkan beberapa literatur dan penelitian yang pernah ada dan sudah dilakukan menunjukkan fakta bahwa pragmatisme masyarakat dalam mengikuti pemilu sangat besar. Dan bisa dipastikan budaya tersebut memang sudah menjadi adat atau kebiasaan yang berkembang sudah cukup lama ditengah masyarakat.

Pragmatisme yang ada dalam masyarakat dapat dibuktikan pada setiap pelaksanaan pemilu, dimana *money politics* selalu saja marak pada setiap pelaksanaan pemilu. Hal itu dilakukan dengan sadar oleh para kandidat yang bersaing dalam pemilu, karena strategi tersebut terbukti sangat manjur dalam melakukan penjangkaran dukungan masyarakat pemilih.

Di kabupaten Lanny Jaya permasalahan ini juga diakui oleh beberapa informan bahwa fenomena politik uang saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 lalu sangat tinggi. Mereka mengaku hampir semua kandidat yang bertarung melakukan strategi tersebut. Besaran uang yang diberikan juga cukup bervariasi. Dan itu dilakukan oleh para kandidat sendiri atau tim sukses mereka.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Desa Gumagame kecamatan Jiginua kabupaten Lany Jaya provinsi Papua terdapat beberapa faktor yang menghambat partisipasi politik masyarakat diantaranya :
 - Faktor Pemerintah terkait dengan keberadaan peraturan perundangan,
 - Factor penyelenggara baik KPUD maupun PANWASDA
 - Faktor partai politik yang menjadi peserta atau pengusung dari calon yang berkompetisi.
 - Peran Media.
2. Sedangkan yang menjadi factor pendorong sehingga masyarakat mau memberikan partisipasi politiknya saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Desa Gumagame kecamatan Jiginua kabupaten Lany Jaya provinsi Papua, diantaranya adalah :
 - Besarnya keinginan untuk berpartisipasi.
 - Peran media massa yang gencar memberi info seputar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - Kandidat yang saat itu ikut berkompetisi
 - Factor social budaya yang melekat di Desa Gumagame.

B. Saran

1. Berbagai peraturan yang menyangkut system kepemiluan sebaiknya segera di perbaiki agar tidak menjadi factor penghambat dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

2. Partai politik sudah harus segera berbenah agar dapat kembali menarik kepercayaan dari warga. Karena keberadaan partai politik saat ini justru sedang dalam titik nadir terkait dengan kepercayaan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, 2008. **Dasar-Dasar Ilmu Politik**. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Efriza, 2012. **Political Explore** (Sebuah Kajian Ilmu politik), Bandung, P.T. Alfabeta.
- Gaffar M. Janedri, 2012. **Politik Hukum Pemilu**, Jakarta: Konstitusi Pers.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012, **Negara** (Demokrasi Dan Civil Society), Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hollyson Rahmat MZ dan Sri Sundari, 2015. **Pilkada Penuh Euforia Miskin Makna**, Jakarta: Bestari.
- Lutfi. Mustafa, 2010. **Hukum Sengeta Pemilukada di Indonesia** (Gagasan Perluasan Kewenangan Kontitusional Mahkamah Kontitusi), Cetakan Pertama Pertama, Yogyakarta, UII Pers.
- Maleong, Lexy J. 2012 *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001).
- Pasolong, Harbani, 2012. **Metode Penelitian Administrasi Public**. Bandung Alfabeta
- Rahman H.A. 2007. **Sistem Politik Indonesia**, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raga Maran, Rafael, 2010. **Pengantar Sosiologi Politik**, Jakarta: Rineka Cipta
- Ridwan, 2009. **Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian**. Jakarta: Alfabeta
- Rush, Althoff, 2010. **Pengantar Sosiologi Politik dalam Pengantar Sosiologi Politik**, oleh Damsar, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Satori, Djaman, dan Aan Komariah, 2014. **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung: Alfabeta
- Surbakti Ramlan, 1992. **Memahami Ilmu Politik**. Jakarta: Gransido.
- Setiadi Elly M. dan Usman Kolip, 2013. **Pengantar Sosiologi Politik**, Jakarta Prenadamedia Grup.

Sumber Lain:

Undang undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota (www.wikipedia.com)

<https://www.sridianti.com/faktor-memengaruhi-partisipasi-politik.html>
(unduh)